

## Jurnal Agrosilvopasture-Tech

Journal homepage: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/agrosilvopasture-tech>

### **Analisis Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon**

*Analysis of Constraints in the Implementation of the Farmer's Card Program Policy in Passo Village, Teluk Ambon Baguala District, Ambon City*

**Nurhaya Pellu<sup>1</sup>, Inta P. N. Damanik<sup>2</sup>, Johanna M. Luhukay\***

<sup>1</sup> Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon 97233, Indonesia

<sup>2</sup> Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon 97233, Indonesia

\* Penulis korespondensi e-mail: [johanna\\_m19@yahoo.com](mailto:johanna_m19@yahoo.com)

#### **ABSTRACT**

**Keywords:**

Constraint Analysis;  
Farmer's Card Program;  
Policy Implementation

The purpose of this study is to find out the obstacles in the implementation of the farmer card program policy, and to find solutions to the obstacles in the implementation of the farmer card program policy. The research was conducted in Paso Village, Teluk Ambon Baguala District, Ambon City. The population of this study is farmers who are members of farmer groups. The data analysis method used is descriptive kualitative using simple tabulation analysis. The results showed that farmers generally do not use farmer cards to transact at retailer kiosks. The obstacle to the realization of the Ambon City farmer card program is the absence of synchronization between stakeholders, namely from farmers, retailers, distributors, producers, provincial and city technical offices, and banks so that the farmer card program entered in Ambon City from 2017 until now has not been realized.

#### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**

Analisis Kendala;  
Implementasi Kebijakan;  
Program Kartu Tani

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dalam implementasi kebijakan program kartu tani, dan untuk mencari solusi terhadap kendala dalam implementasi kebijakan program kartu tani. Penelitian dilakukan di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon. Populasi penelitian ini adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis tabulasi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani pada umumnya tidak menggunakan kartu tani untuk bertransaksi di kios pengecer. Kendala realisasi program kartu tani Kota Ambon adalah tidak adanya sinkronisasi antar stakeholders yaitu dari Pihak Petani, Pengecer, Distributor, Produsen, Dinas Teknis Provinsi dan Kota, serta Perbankan sehingga program kartu tani yang masuk di Kota Ambon dari tahun 2017 hingga saat ini belum terealisasikan.

#### **PENDAHULUAN**

Sektor pertanian merupakan bidang penting yang perlu diperhatikan. Sektor pertanian yang ditujukan untuk menambah ketentraman petani dan tidak dapat dipisahkan dari sasaran lain yakni meningkatkan hasil dan kapasitas produksi. Salah satu bantuan pemerintah dalam pengadaan unsur pertanian yaitu dengan

memberikan subsidi pupuk yang mudah ditebus oleh petani. Kesejahteraan petani tidak terlepas dari tiga kondisi antara lain masalah pupuk, bibit dan kualitas/harga (Dahiri, 2018).

Pertumbuhan produktivitas pertanian tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pupuk merupakan input yang benar-benar menentukan produksi dan produktivitas pertanian (Irawan *et al.*, 2016). Dalam kaitan ini, pemerintah bertujuan untuk menyediakan fasilitas produksi yang memadai bagi pengguna pupuk untuk memenuhi permintaan dan menyediakannya dengan harga yang wajar (Ependy, 2020).

Persoalan pupuk di Indonesia sering menjadi masalah yang tanpa disadari mempengaruhi kebutuhan serta keberlanjutan petani dalam mengelola lahan/sawahnya. Sehingga, dalam kasus langkanya pupuk serta tingginya harga, petanilah yang menjadi korban terbesar. Untuk mengantisipasi hal yang telah terjadi, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk bagi petani untuk terlibat dalam peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani (Darwis & Supriyati, 2016). Program subsidi pupuk yang digagas pemerintah menargetkan petani kecil untuk mengikuti “enam prinsip” dalam produksi tanaman, yakni tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat kualitas, dan tepat harga (Gunawan & Pasaribu, 2016).

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Maluku melakukan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dalam upaya menerbitkan kartu tani sebagai salah satu cara mengoptimalkan kebijakan subsidi pupuk untuk kepentingan masyarakat. Tujuannya bagi masyarakat ialah pupuk yang diangkut dapat didistribusikan dengan cepat dan tepat sesuai dengan asas 6 tepat (Ashari & Hariani, 2018). Pelaksanaan program kartu tani berlangsung dalam beberapa tahapan, yaitu pengusulan kartu tani dan pembuatan RDKK, penerbitan kartu tani dan penggunaan kartu tani. Pada dasarnya pelaksanaan program kartu tani terdiri dari dua bagian yaitu proses pembuatan dan penebusan subsidi pupuk (Sriwinarti & Faesal, 2016).

Luas lahan untuk Desa Passo adalah 24.2 ha yang terdiri dari 117 petani dari 11 kelompok tani dengan komoditi yang diusahakan yaitu: Sawi, Bayam, Kangkung, Pare, Tomat, Cabe, Jagung, Kacang Panjang, Terung, Ubi Kayu, dan Ketimun. Dilihat dari luas lahan milik petani itu sendiri masing-masing memiliki luas lahan mulai dari 0.1–0.75. luas lahan tersebut masih terbilang sempit dikarenakan semua ukuran lahan pertaniannya dibawah 2 ha yang artinya petani tersebut diwajibkan untuk mendapatkan kartu tani. Dapat dilihat dari pengertian kartu tani itu sendiri adalah salah satu program pemerintah yang diberlakukan bagi petani skala kecil yang dimana ukuran lahannya kurang dari 2 ha untuk penyaluran bersubsidi pupuk sesuai dengan Harga yang sudah ditentukan pemerintah (HET).

Petani memiliki kebebasan sebagai pelaksana program dan kegiatan pembangunan pertanian walaupun dibatasi karena berbagai peraturan program beserta pengawasan kegiatan sektoral. Ketersediaan sumberdaya produksi seperti benih, pupuk dan obat-obatan pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat merupakan syarat dalam keberhasilan budidaya. Dalam hal ini, Kartu Tani merupakan kuota yang penting bagi petani dalam memfasilitasi pembelian pupuk sesuai dengan kebutuhannya, yang nilainya disubsidi oleh negara, yang secara keseluruhan dapat menekan biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi petani. Adapun penerbitan Kartu Tani didasarkan pada kebijakan pembangunan pertanian dengan tujuan untuk lebih meningkatkan produksi serta produktivitas pertanian.

Pada kenyataannya, program kartu tani masuk di Kota Ambon dari tahun 2017 dan sampai saat ini (tahun 2023) kartu tani tersebut belum terealisasi sehingga menarik untuk diteliti “Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon”. Dengan tujuan mengetahui kendala-kendala dalam implementasi kebijakan program kartu tani dan mencari solusi terhadap kendala dalam implementasi kebijakan program kartu tani.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon. Untuk pemilihan lokasi penelitian secara sengaja dilakukan (*purposive*) melalui pertimbangan yaitu Desa Passo merupakan salah satu sentra produksi pertanian yang ada di Kota Ambon. Sampel penelitian ini adalah *Multistage Purposive Sampling* dengan patokan yaitu petani yang tergabung dalam kelompok tani.

Jumlah sampel yang ditentukan dalam penelitian ini memakai rumus Slovin (1960) dengan total unit populasi penelitian berjumlah 117 petani di Desa Passo dengan total sampel yang diambil sebanyak 54 sampel yang tersebar di 11 Kelompok Tani yaitu Passo Indah Jaya, Indah Sejahtera, Turatea, Tunas Harapan, Passo Indah, Berkah, RRI Jaya, Nur Rahmat, Karya Tani, Akabi, dan Cempaka. Dapat dilihat hasil perhitungannya sesuai Persamaan 1.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{117}{1+117(0.1^2)} = \frac{117}{2.17} = 54 \quad (1)$$

Dimana: n = Jumlah sampel; N = jumlah populasi, e = margin of error

Dalam penelitian ini, deskriptif kualitatif digunakan dalam analisis data. Sugiyono (2019) mengatakan bahwa dalam penelitian menggunakan metode kualitatif perlu didasarkan pada suatu pemikiran yang mempelajari objek dalam kondisi alamiah (kondisi nyata, kondisi tidak ditentukan atau eksperimental) dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Hal ini karena penelitian kualitatif menitikberatkan pada hasil penelitian yang didasarkan pada kemampuan peneliti sendiri untuk mendeskripsikan, menganalisis, menyintesis dan mengevaluasi, bukan statistik yang dihasilkan oleh alat penelitian, seperti dalam penelitian kuantitatif. Jadi, peneliti sendiri adalah salah satu instrumennya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabulasi sederhana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Respon Petani Terhadap Kartu Tani

#### Pengetahuan petani terhadap kartu tani

Jika dilihat dari manfaat kartu tani, kebanyakan petani mengenal kartu tani hanya sebagai penebusan subsidi pupuk dan sebagai buku tabungan, dan masih banyak petani yang tidak tahu manfaat kartu tani dapat memberikan pinjaman modal (kemudahan dalam akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)) serta menjual hasil panen menggunakan kartu tani. Hal ini disebabkan petani tidak memperhatikan informasi yang diberikan oleh penyuluh atau dinas terkait.

#### Harapan petani terhadap kartu tani

Harapan dari kartu tani adalah dapat berjalan dengan baik di seluruh Indonesia khususnya Desa Passo dan dilaksanakan secara merata sehingga informasi petani tepat (valid) dan kuota pupuk petani tercukupi. Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan dalam penggunaan Kartu Tani, petani berharap dapat bekerja dengan benar, adil dan sesuai aturan. agar petani yang menggunakan kartu tani, dapat dengan mudah mengetahui berapa banyak pupuk yang mereka butuhkan.

Petani mengharapkan Kartu Tani menjadi program yang berkelanjutan dan bukan hanya tentang uji coba. Oleh karena itu, sistem tersebut harus diperbaiki agar tidak merugikan petani. Petani juga mengharapkan adanya perbaikan lebih lanjut dalam sistem, alokasi dan pelayanan Kartu Tani. Perlu adanya perbaikan sistem agar kartu tani dapat digunakan secara efektif. Untuk sosialisasi perlu diperkuat agar Masyarakat tani dapat mengerti dalam menggunakan dan atau membeli pupuk dengan kartu tani. Petani juga berharap ketika membeli pupuk dengan menggunakan kartu tani tidak ada biaya tambahan.

“Harapan kami (petani) melalui kartu tani ini semoga tidak lagi mengalami kesulitan dan kelangkaan pupuk, tidak ada penyimpangan pupuk (mafia pupuk) dan distribusinya dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dan transparan dan semoga kartu tani ini dapat direalisasikan”.

Untuk sosialisasi kartu dilakukan dari tahun 2018 dan pembagian kartu tani dimulai dari pertengahan tahun 2020. Tetapi ada sebagian petani yang menerima kartu tani ditahun 2020, 2021 dan juga 2022, dan untuk petani yang belum mendapatkan kartu tani nya akan diproses di tahun 2023. Pembagian kartu tani di lakukan oleh penyuluh wilayah binaan.

#### Kebutuhan pertama yang diinginkan petani apabila kartu tani telah digunakan

Program kartu tani dibuat berdasarkan berbagai isu sosial terkait penerimaan pupuk subsidi. Petani percaya bahwa dengan adanya program kartu tani ini dapat mengurangi resiko gagal panen dikarenakan terjaminya akan kebutuhan pupuk bersubsidi. Terkait dengan hasil dari program kartu tani ini, petani merasa lebih mudah mendapatkan subsidi pupuk dan kebutuhan akan pupuk untuk usahataniya terpenuhi. Selain itu, petani percaya bahwa dengan adanya kartu tani dapat mendorong kebiasaan menabung dan membiasakan petani untuk berhemat.

“Yang kami (petani) butuhkan pertama apabila kartu tani sudah dapat digunakan adalah penebusan pupuk bersubsidi dikarenakan harganya yang relative murah untuk kita (petani) yang berpenghasilan rendah dan semoga dengan adanya kartu tani ini kami bisa mengurangi resiko kegagalan dalam berusaha”.

Walaupun nantinya kartu tani digunakan, untuk sementara kartu tani di Desa Passo fokusnya hanya untuk penebusan pupuk bersubsidi dan tidak digunakan untuk transaksi lainnya. Tetapi bukan berarti kedepannya tidak digunakan.

### Usaha yang digunakan petani apabila kartu tani belum digunakan

#### Intensifikasi Pertanian

Merupakan salah satu cara untuk mengembangkan hasil pertanian dengan mengoptimalkan input, mulai dari menggunakan benih yang lebih baik, pengairan yang baik, penggunaan pupuk berimbang, pengelolaan tanah yang lebih baik, serta pengendalian hama dan penyakit yang baik.

#### Mekanisasi Pertanian

Merupakan cara untuk meningkatkan hasil pertanian dengan mempercepat pengerjaan alat dan mesin, mengefisienkan waktu dan biaya serta mengurangi kemungkinan kerusakan pada saat panen.

#### Diversifikasi Pertanian

Merupakan cara untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menanam beberapa jenis tanaman pada area atau lahan pertanian.

### Usaha petani memenuhi kebutuhan (pupuk subsidi) ketika kartu tani belum digunakan

Berhubung kartu tani di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon belum digunakan, maka petani masih menggunakan cara manual untuk penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer (CV. Sinar Tani Kota Ambon). Penebusannya dengan menggunakan KTP dengan mekanisme antara lain:

- a) Petani menunjukkan KTP untuk difoto (open camera) atau difotocopy oleh kios pengecer dan dicatat transaksi penebusannya dalam hal ini (Nama, NIK, jenis dan jumlah pupuk, tanggal penebusan, serta tanda tangan).
- b) Kios pengecer menginput transaksi penebusan kedalam aplikasi T-Pubers.  
Atau dengan cara sebagai berikut:
  - a) Petani menunjukkan KTP untuk dipindai NIK nya untuk mengakses data petani di e-Alokasi.
  - b) Kios pengecer menginput jumlah transaksi penebusan.
  - c) Petani menandatangani bukti transaksi
  - d) KTP di foto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.

Jika petani tidak dapat melakukan penebusan secara individu dikarenakan beberapa hal antara lain: alasan kesehatan, usia lanjut, musibah, dan lain-lain maka penebusan dapat dilakukan oleh ketua kelompok atau pengurus kelompok tani yang diberi kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Membuat surat kuasa dengan dilampirkan fotocopy KTP petani yang memberi kuasa.
2. Penerima kuasa menandatangani bukti transaksi.
3. KTP beserta penerima kuasa difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
4. Kios pengecer menginput jumlah transaksi penebusan per NIK sesuai surat kuasa.

### Faktor Kendala/Penghambat

#### Komunikasi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon dalam mengupayakan program kartu tani, tidak lepas dari kontribusi beberapa komponen mulai dari tingkat kabupaten maupun kecamatan. Komponen-komponen tersebut meliputi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), KPL berperan sebagai penyalur pupuk subsidi, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Kelompok Tani. Pelaksanaan program kartu tani di setiap kecamatan pada dasarnya masih terdapat permasalahan-permasalahan. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Nania merupakan salah satu BPP yang mendapatkan sosialisasi program kartu tani dan telah membagikan kartu tani kepada kelompok-kelompok tani di wilayah kerjanya tetapi kartu tani tersebut belum pernah dipakai petani dalam pembelian bersubsidi pupuk.

Kendala realisasi program kartu tani Kota Ambon adalah tidak adanya sinkronisasi antar stakeholders yaitu dari Pihak Petani, Pengecer, Distributor, Produsen, Dinas Teknis Provinsi dan Kota, serta Perbankan sehingga program kartu tani yang masuk di Kota Ambon dari tahun 2017 hingga saat ini belum terealisasi. Disitulah masalah terbesar dimulai, yang diawali dengan kurangnya komunikasi yang berujung pada kesalahpahaman antara petani selaku penerima manfaat dikarenakan penjelasan yang kurang lengkap atau penjelasan/informasi yang diberikan terlalu cepat di awal. Hal ini menyebabkan pelaksanaan yang kurang baik dan mengakibatkan petani tidak dapat memanfaatkan kartu taninya.

Pemerintah (pusat dan daerah) dan lembaga keuangan dianggap kurang terencana, tidak komprehensif serta tidak melibatkan pihak-pihak di lapangan dalam melaksanakan pembinaan serta promosi ke petani dan pengecer, sehingga pelaksanaannya tidak terlaksana dengan baik begitu pula petani kecil yang tidak membawa manfaat nyata. Proses sosialisasi program kartu tani merupakan titik awal dalam penyaluran pendapat semua pihak tentang keuntungan dan mekanisme penggunaan kartu tani. Keputusan yang diambil petani mengenai inovasi baru, dalam hal ini kartu tani, membutuhkan waktu dan proses yang berulang mulai dari kesadaran, reaksi, serta penerimaan ataupun penolakan informasi (Rogers & Shoemaker, 1971) dalam (Hanafi, 1981).

Informasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa petani pada umumnya tidak menggunakan kartu tani untuk bertransaksi di kios pengecer. Dalam hal seperti ini, perlu dilihat kembali strategi pelaksanaannya agar lebih efektif dalam penggunaan kartu tani untuk mendukung penyaluran pupuk bersubsidi dan dapat segera dilaksanakan.

### Sumberdaya

Anggaran berperan penting dalam tercapainya tujuan program. Anggaran khusus untuk kartu tani tidak ada padahal anggaran merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk terlaksananya suatu program. Selama proses pengenalan kartu tani, pemerintah tidak memberikan pengeluaran atau anggaran khusus kepada BPP (dalam hal ini BPP Nania) dalam melakukan pendataan kepada petani selaku penerima kartu tani. Hal ini menimbulkan hambatan dalam mencapai tujuan kartu tani.

### Solusi/Langkah-langkah

1. Agar pada tahap pelaksanaan tidak terjadi kesalahpahaman baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat petani, diperlukan koordinasi dan kesamaan pandangan terhadap peraturan implementasi kartu tani. Kartu tani merupakan bagian dari program pembangunan pertanian daerah.
2. Adanya kerjasama antara BRI, Kementerian Pertanian dan DUKCAPIL dalam hal penyediaan dan validasi data pengguna kartu tani.
3. Percepatan pelaksanaan program Kartu Tani memerlukan kreatifitas dan motivasi yang kuat dari Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program, misalnya menyediakan teknologi informasi dan manajemen sumber daya manusia yang memadai terkait input dan validasi. Dukungan untuk data petani dan e-RDCK, mendukung pekerjaan dewan daerah dalam entri data, serta MoU dengan bank, dinas kependudukan dan kios pengecer.
4. Sosialisasi program kartu tani harus dilaksanakan secara terpadu dan dipantau serta dibimbing secara rutin agar petani/pengecer benar-benar memahami informasi yang terdapat dalam kartu tani.
5. Dari sisi Kementan maupun BRI perlu dilakukan kemudahan dan peningkatan pelayanan misalnya dengan menambah jumlah kios agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengenalan program kartu tani terkait cara membeli pupuk bersubsidi, agar petani lebih memahami program tersebut.
6. Adanya kepastian terkait ketersediaan pupuk bersubsidi di kios-kios pengecer
7. Memudahkan perolehan ataupun penggunaan kartu tani agar terpakai secara keseluruhan.

### KESIMPULAN

Kendala Implementasi Program Kartu Tani di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kartu tani merupakan salah satu program baru yang dikeluarkan pemerintah yang dimana dalam pelaksanaannya mulai dari sistem maupun teknis masih terdapat kendala. Kendala realisasi program kartu tani Kota Ambon khususnya Desa Passo adalah tidak adanya sinkronisasi antar stakeholders yaitu dari Pihak Petani, Pengecer, Distributor, Produsen, Dinas Teknis Provinsi dan Kota, serta Perbankan sehingga program kartu tani yang masuk di Kota Ambon dari tahun 2017 hingga saat ini belum terealisasi.
2. Informasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa petani pada umumnya tidak menggunakan kartu tani untuk bertransaksi di kios pengecer (CV. Sinar Tani Kota Ambon). Dalam hal seperti ini, perlu dilihat kembali strategi pelaksanaannya agar lebih efektif dalam penggunaan kartu tani untuk mendukung penyaluran pupuk bersubsidi dan dapat segera dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, M.L., & Hariani, D. (2018). Analisis efektivitas program kartu tani di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Adminitasi Publik*, 53(9), 1689–1699.
- Dahiri. (2018). Upaya meningkatkan kesejahteraan petani tanaman pangan dan pemberdayaan desa melalui program padat karya tunai di desa (PKTD). *Buletin APBN*, 3(14), 3–8.
- Darwis, V., & Supriyati, N. (2016). Subsidi pupuk: Kebijakan, pelaksanaan, dan optimalisasi pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 45. <https://doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.45-60>.
- Ependy, A. (2020). Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Ke Kelompok Tani Di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banuasin. 2507 (February).
- Gunawan, E., & Pasaribu, S. (2016). Persepsi petani dalam implementasi program kartu tani untuk mendukung distribusi pupuk bersubsidi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(02).
- Hanafi, A. (1981). Memasyarakatkan Ide-Ide Baru. Surabaya: Surabaya Press.
- Irawan, B., Handayani, N., & Sularno. (2016). Analisis pelaksanaan kebijakan dan distribusi pupuk bersubsidi di kabupaten karawang jawa barat. *Agrosains dan Tekonologi*, 1(2), 74–87.
- Sriwinarti, N. K., & Faesal, A. (2016). Sistem informasi distribusi pupuk bersubsidi pada Kecamatan Gerung Lombok Barat. *Jurnal Matrik*, 15(1), 1–5. <https://doi.org/10.30812/matrik.v15i1.30>.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Roger, E. M., & Shoemaker, F. F. (1971). *Communication of Innovation*. London: The Free Press.